

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Sindang Heula

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (4/3).

Kepala Negara menyebutkan, bendungan itu bermanfaat untuk banyak hal, mulai dari irigasi hingga pariwisata.

"Alhamdulillah pada hari ini Bendungan Sindang Heula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Bendungan Sindang Heula akan meningkatkan produktivitas pertanian di Serang dan sekitarnya.

Dengan kapasitas air 9,3 juta meter kubik, bendungan ini dapat menyalurkan irigasi ke 1.280 hektare sawah di Provinsi Banten.

"Sehingga kita harapkan Bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam

menjamin ketersediaan air yang cukup, sehingga sekali lagi kita semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan khususnya di Provinsi Banten," ujar Jokowi.

Bendungan Sindang Heula juga mampu menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik. Hal ini penting bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kabupaten dan Kota Serang, juga Kota Cilegon.

ini, kata Jokowi, Pemprov Banten sudah mulai menggunakan separuh air baku dari Bendungan Sindang Heula atau 0,40 meter kubik per detik.

Selain itu, Bendungan Sindang Heula juga bermanfaat untuk mereduksi banjir hingga 50 meter kubik per detik. Jokowi menyebut, di Kabupaten Serang dan sekitarnya banjir kerap terjadi karena meluapnya Sungai Cijung dan Sungai Cidurian. ● han

Effendi Gazali Jadi Penasehat Menteri KKP Dipertanyakan Hakim

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Hakim Albertus Usada sempat mempertanyakan kualifikasi Effendi Gazali sebagai penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Rabu (3/3). Pasalnya, sepengetahuan Hakim, Effendi adalah pakar komunikasi politik.

Menanggapi hal itu, Effendi menjelaskan, adanya tim komunikasi adalah sesuai permintaan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di KKP.

"Bachtiar Aly bersama saya (Effendi Gazali) pada bidang Komunikasi Publik. Presiden memang meminta Menteri untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan," kata Effendi,

Kamis (4/3).

Effendi menjelaskan banyak penasehat Menteri KKP sesuai kualifikasi masing-masing. Misalnya, Hasjim Djajal (Bidang Hukum Laut & Diplomasi Maritim), Hikmahanto Juwana (Bidang Hukum Internasional) dan Rokhmin Dahuri (Bidang Daya Saing SDM, Inovasi Teknologi dan Riset).

Selain itu, ada nama Martani Huseini (Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan), Jamaluddin Jompa (Bidang Ekologi Kelautan) dan Nimmi Zulbainarni (Bidang Sosial-Ekonomi) dan lain-lain.

Effendi mengatakan, sejak kecil saat tinggal di daerah pantai ia sudah tertarik dengan dunia kelautan dan perikanan. Pada 2010, dia mendukung budidaya karapung dengan sistem Keramba Jaring Apung. ● mei



IDN/ANTARA

TES USAP PCR MASSAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KUALA LUMPUR

Seorang pekerja migran Indonesia (PMI) mengikuti tes usap (swab test) PCR COVID-19 di Gedung World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (4/3). Aliansi Ormas Indonesia (AOMI) di Malaysia dan Pantai Hospital memfasilitasi tes usap tersebut kepada 150 orang PMI yang akan melakukan penerbangan menuju Surabaya pada Sabtu (6/3) lusa.

Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY Digelar 17 Maret 2021

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) sudah menetapkan jadwal sidang perdana perkara atas gugatan yang dilayangkan mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbut terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang pertama untuk perkara nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tersebut dijadwalkan pada 17 Maret 2021.

"Benar (sidang pertama pada Rabu, 17 Maret 2021). Agendanya pembacaan gugatan," ungkap Humas PN Jakpus Bambang Nurcahyono, Kamis (4/3).

Gugatan itu didaftarkan Jhoni pada Selasa (2/3). Selain AHY selaku tergugat I, Jhoni juga menggugat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya (tergugat II) dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan (tergugat III).

Dikutip dari laman SIPP, poin pertama dalam petitiun gugatan Jhoni berbunyi menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, Jhoni meminta majelis hakim me-

nyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.

Berikutnya, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan tergugat III terkait pemberhentian Jhoni.

Petitiun keempat berbunyi, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatihan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPPP/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.

Adapun gugatan tersebut dilayangkan sebagai buntut dari pemecatan Jhoni imbas bergulirnya isu kudeta di internal Partai Demokrat. Jhoni dipecat karena dianggap terlibat dan mendukung upaya kudeta tersebut. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KOMISI YUDISIAL AUDIENSI KE KPK

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (kedua kiri) dan Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri) bersiap memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/3). Dalam pertemuan tersebut Komisi Yudisial meminta dukungan KPK agar ikut memantau proses rekrutmen calon hakim agung seperti menelisik LHKPN dan penelusuran rekam jejak agar mendapatkan hakim agung dengan kapasitas dan integritas yang mumpuni, demi peradilan yang bersih.

Dituduh Kudeta, Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief meminta polisi bubarkan acara yang diduga sebagai KLB yang digelar di Sumatera Utara, Kamis (4/3) hingga Sabtu (6/3).

JAKARTA (IM) - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak terima dituduh akan melakukan kudeta, akhirnya melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bareskrim Polri.

Kuasa Hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah mengungkapkan, dalam laporan ke Bareskrim Polri, pihaknya hendak mempolisiskan lima orang yang dianggap telah mencemarkan nama baik dan memfitnah kliennya tersebut.

"Ada lima orang yang kami rencana laporkan ini ya. Lima orang yang rencana kami laporkan ini satu hanya kliennya merasa dicemarkan nama baiknya lantaran tidak ada proses klarifikasi kepada Marzuki soal tuduhan terse-

but. Dia menyatakan, kliennya dipecat dengan tidak hormat pada 26 Februari 2021 lalu dengan sebutan Partai Demokrat memecat penghianat partai.

"Padahal, di surat keputusan pemberhentian, klien tidak ada kata-kata seperti itu. Nah 3 hal ini yang melatarbelakangi kita sampai ke Bareskrim," ujarnya.

Sebelumnya, selain mengajukan gugatan atas pemecatannya bersama 6 kader Partai Demokrat lainnya ke Pengadilan Negeri, Marzuki Alie juga akan melaporkan sejumlah fungsionaris Demokrat ke Bareskrim Polri atas fitnah yang dicalitkan kepada dirinya atas Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

"Kalau (laporan) ke Bareskrim sedang dikumpulkan bukti-bukti oleh pengacara," kata Marzuki saat dihubungi, Rabu 3 Maret 2021.

Mantan Ketua DPR RI dari Partai Demokrat itu menjelaskan, laporan ke Bareskrim tersebut atas segala fitnah yang ditujukan kepada dirinya atas

gerakan kudeta Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Terkait ya fitnah, saya tuh nggak tahu apa-apa loh, demi Allah," ujarnya.

KLB di Gelar di Medan?

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief meminta polisi membubarkan acara yang diduga sebagai kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Sumatera Utara, Kamis (4/3) hingga Sabtu (6/3).

Menurut Andi, KLB digelar tanpa izin Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diikuti oleh peserta ilegal.

"Polisi harus bubarkan kerumunan ilegal ini. Kalau tidak maka kader Demokrat akan membantu polisi membubarkan," kata Andi saat dihubungi, Kamis (4/3).

Selain itu Andi juga meminta Presiden Joko Widodo tidak membiarkan acara tersebut terlaksana. Andi menyebut acara tersebut akan diikuti oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu disebut Demokrat sebagai pihak eksternal yang akan mengambil alih posisi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pak Jokowi jangan melakukan pembiaran adanya kudeta," ujarnya.

Sementara itu, dalam akun Twitter-nya, Andi menulis soal temuan tim Demokrat terkait rencana penyelenggaraan KLB. Ia mengatakan, tim menemukan bukti tiket pesawat milik Moeldoko yang terjatuh di Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Sumatera Utara. ● han

Golkar Gelar Rapimnas Jumat - Sabtu, Airlangga akan Sampaikan Pidato Politik

JAKARTA (IM) - Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2021 pada Jumat (5/3) hingga Sabtu (6/3). Dalam rapim tersebut, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto akan menyampaikan sikap politik Partai Golkar.

"Di akhir rapimnas nanti setelah mendengarkan masukan-masukan seluruh pimpinan-pimpinan DPD Partai Golkar provinsi seluruh Indonesia, diakhiri dengan sato, pernyataan politik ketua umum terkait dengan situasi dan kondisi terkini," kata Ketua Panitia Pengarah Rapimnas Golkar Adies Kadir dalam konferensi pers, Kamis (4/3).

Adies mengatakan, beberapa isu akan dibahas dalam rapimnas tersebut, antara lain persiapan menjelang pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah berikutnya. Rapimnas akan membahas strategi untuk memenangkan pileg, pilpres, dan pilkada mendatang.

Menurut Adies, tidak menutup kemungkinan dalam

pernyataan politik yang disampaikan Airlangga berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebut, pernyataan politik Airlangga akan bergantung pada masukan-masukan yang diterima dari daerah maupun organisasi sayap Partai Golkar.

"Kita tunggu saja di rapimnas nanti perkembangannya, apa yang akan disampaikan ketua umum sebagai pernyataan politik tersebut," ujar Adies. Di samping isu-isu pemilu, rapimnas juga akan membahas sejumlah isu maupun program-program di internal partai berlambang pohon beringin itu. Beberapa di antaranya adalah peluncuran Golkar Institute, Yellow Clinic atau Klinik Kuning, serta membahas perubahan beberapa peraturan administrasi internal partai.

Adapun Rapimnas Partai Golkar akan digelar secara online maupun offline di mana pengurus DPD tingkat provinsi akan hadir langsung sementara pengurus DPD tingkat dua dan organisasi sayap mengikuti secara daring. ● mei

Eks Dirjen Perikanan Bantah Berita Pernah Diancam akan Dicotot

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menegaskan, mantan Menteri KP Edhy Prabowo maupun staf khususnya, Andrea Misanta Pribadi, tidak pernah mengancam bakal mencopotnya karena tidak ingin menandatangani ekspor benih lobster lima perusahaan.

Hal itu diungkapkan Zulficar untuk meluruskan pemberitaan sebelumnya terkait keterangannya saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3).

"Yang benar adalah, stafus mengatakan menteri akan mengontak langsung ke saya tentang hal itu," ungkap Zulficar dalam keterangannya, Kamis (4/3). "Saya mundur dari Jabatan Dirjen Perikanan Tangkap medio Juli 2020 bukan karena diancam oleh stafus atau menteri. Kasihan kalo mereka menanggung beban lebih berat dari kutipan info yang tidak pas," ujarnya.

Ia mundur dari jabatannya di KKP dikarenakan perbedaan prinsip. Pertama, kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan atau sustainability serta tidak berpihak pada kelompok yang

KASUS KORUPSI ALKES

Eks Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp14 Miliar

JAKARTA (IM) - Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Giatno Rahardjo dan eks Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara yang tergabung dalam Permai Grup, Minarsi, didakwa merugikan negara Rp14.139.223.215 (Rp14 miliar lebih).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Wahyu Prayitno dalam dakwaannya menyatakan, Bambang Giatno dan Minarsi turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi Universitas Airlangga (Unair) tahap 1 dan 2, tahun 2010. Keduanya didakwa terlibat kasus korupsi bersama-sama dengan sejumlah pihak lainnya.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melanggar ketentuan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh.

Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003," kata Jaksa Eko di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2021). Bambang Giatno dan Minarsi didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Zulkarnain Kasim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Muhammad Nazarudin selaku pemilik dan pengendali Permai Grup sekaligus mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat.

Dalam dakwaannya, Bambang Giatno diduga telah memperkaya diri sendiri sebesar 7.500 dolar AS atau setara Rp107 juta rupiah (kurs saat ini). Jaksa juga mendakwa Bambang dan Minarsi memperkaya orang lain diantaranya, Zulkar-

nain Kasim sebesar 9.500 dollar AS; Bantu Marpaung sebesar Rp154 juta; Ellisnawaty sebesar Rp100 juta.

Tak hanya itu, Bambang Giatno dan Minarsi juga memperkaya korporasi Permai Grup sebesar Rp13.681.223.215 (Rp13 miliar). Atas perbuatan Bambang Giatno dan Minarsi tersebut, negara mengalami kerugian sejumlah Rp14 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.14.139.223.215, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara," ucap Jaksa Eko.

Atas perbuatannya, Bambang Giatno dan Minarsi didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han



IDN/ANTARA

KEDATANGAN PRAJURIT SATGAS PAMTAS RI-RDTL

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak digendong oleh sejumlah personel satgas Pamtas RI-RDTL dari satuan Yonif 742/Satria Wira Yudha (SWY) dan Yon Armed 6/Tamarunang usai mengikuti apel penerimaan, di Lantamal VII Kupang, NTT, Kamis (4/3). Kedua satuan ini akan bertugas di perbatasan RI-RDTL menggantikan Yonif Raider Khusus 744/SYB dan Yon Armed 3/105 Tarik yang sudah bertugas selama sembilan bulan di kawasan itu.

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, dengan ini diumumkan bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Nomor 16 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Inspira Citra Asia, yang dibuat oleh Lanawaty Darmadi SH, MM, Mkn., Notaris di Jakarta ("Pernyataan"), antara lain telah memuat:

-Menyetujui konversi hutang Perseroan pada PT Kavita Dana Asia sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi saham dalam Perseroan.

Jakarta, 5 Maret 2021
PT INSPIRA CITRA ASIA
Direksi